



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk kelancaran pelaksanaannya maka dipandang perlu dilakukan Penunjukan Pejabat Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyampiannya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018);

15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. Melaksanakan anggaran unit kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- KETIGA** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 28 Januari 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 47 TAHUN 2021

TANGGAL : 28 Januari 2021

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP	JABATAN		KETERANGAN
		STRUKTURAL	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DENGAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
1	2	3	4	5
1	Dra. Lina Medona, MM NIP. 19690515 199308 2 001	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan Adminstrasi Pemerintahan - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 	Sekretariat Daerah
2	Eri Fortuna, SH NIP. 19660104 199303 1 006	Kepala Bagian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah - Fasilitasi Bantuan Hukum - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 	Sekretariat Daerah
3	Deki Yusman, S.STP NIP. 19771217 199703 1 002	Kepala Bagian Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi - Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 	Sekretariat Daerah
4	Ir. Ice Yuliarni NIP. 19611016 199003 1 004	Kepala Bagian Kerjasama dan Adm. Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri - Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan - Pengelolaan dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 	Sekretariat Daerah
5	Davli, S.Sos, M.Si NIP. 19700716 199202 1 001	Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Pegelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 	Sekretariat Daerah
6	Ria Wijayanty, ST, MT NIP. 19770413 200003 2 002	Kabag Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil - Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan & Perikanan - Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup - Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan energi dan air 	Sekretariat Daerah

NO	NAMA / NIP	STRUKTURAL	JABATAN	KETERANGAN
			KUASA PENGGUNA ANGOARAN DENGAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
			- Penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	
40	Yuniwal, MT, SE NIP. 19720613 199203 1 003	Kabid Pengelolaan Sampah Limbah dan Pertamanan	- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Penyimpanan sementara Limbah B3 - Pengelolaan Sampah - Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan pihak swasta	Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat
41	Muliarman, S.ST NIP. 19640914 198603 1 012	Sekretaris	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol
42	Drs. Rasdison NIP. 19640908 199103 1 002	Kabid Kewaspadaan dan Pembinaan Masy.	- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Keewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesbangpol
43	M. Ali Firdaus NIP. 19660531 198603 1 001	Kabid Politik Dalam Negeri	- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesbangpol
44	Zuhardi, S.Pd NIP. 19741115 200212 1 002	Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
45	Atna Lailawati, SE, M.SI NIP. 19671107 199303 2 008	Sekretaris	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan

NO	NAMA / NIP	STRUKTURAL	JABATAN	KETERANGAN
			KUASA PENGGUNA ANGGARAN DENGAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
			<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 	
46	dr. H. Erdison NIP. 19691201 200212 1 002	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 	Dinas Kesehatan
47	drg. Yenni Irmadriani NIP. 19741205 200604 2 010	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 	Dinas Kesehatan
48	Deni Hendra Suryadi, SKM, M.Kes NIP. 19731016 199503 1 003	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/ Kota Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan UKP dan UKM di Wilayah Kerja Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Rumah Tangga Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 	Dinas Kesehatan
49	Desmawita, SP, MKM NIP. 19651227 198903 2 004	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 	Dinas Kesehatan
50	dr. Ratmi NIP. 19701017 201001 2 001	Kepala Puskesmas Tanjung Pati	<ul style="list-style-type: none"> Penigkatan Pelayanan BLUD Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 	Dinas Kesehatan
51	Ns. Masril, S.Kep NIP. 19740605 199303 1 001	Kepala Puskesmas Situjuh	<ul style="list-style-type: none"> Penigkatan Pelayanan BLUD Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 	Dinas Kesehatan
52	Syamsuardi, SKM NIP. 19720924 199201 1 002	Kepala Puskesmas Piladang	<ul style="list-style-type: none"> Penigkatan Pelayanan BLUD Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 	Dinas Kesehatan
53	Rizki Sabri, SKM NIP. 19790708 200501 1 005	Kepala Puskesmas Batu Hampar	<ul style="list-style-type: none"> Penigkatan Pelayanan BLUD Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 	Dinas Kesehatan

NO	NAMA / NIP	JABATAN		KETERANGAN
		STRUKTURAL	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
			DENGAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
54	Suriani Wahyuni S, SKM NIP. 19780609 200604 2 011	Kepala Puskesmas Taram	- Penigkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
55	drg. Meilita Wise Utami NIP. 19750513 200502 2 003	Kepala Puskesmas Mungo	- Penigkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
56	Parti Yasmi, A.Md, Keb NIP. 19710710 199012 2 001	Kepala Puskesmas Halaban	- Penigkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
57	dr. Silvi Rosja NIP. 19840409 201407 2 001	Kepala Puskesmas Dangung-Dangung	- Penigkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
58	drg. Erma Risydianti NIP. 19751102 200501 2 009	Kepala Puskesmas Koto Baru Simalanggang	- Penigkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
59	Yufida, SP NIP. 19670930 198803 2 001	Kepala Puskesmas Padang Kandis	- Penigkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
60	drg. Yone Akdes NIP. 19780704 200901 2 003	Kepala Puskesmas Mungka	- Penigkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
61	Yon Aprianto, A.Md, Kep NIP. 19740606 200604 1 012	Kepala Puskesmas Maek	- Penigkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
62	Fahmi Ridho, MZ, SKM NIP. 19690802 199203 1 008	Kepala Puskesmas Suhki	- Penigkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
63	dr. Febriandi NIP. 19810217 201101 1 001	Kepala Puskesmas Koto Tinggi	- Penigkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
64	Joni Masda, S.Kep NIP. 19750617 199503 1 005	Kepala Puskesmas Banja Loweh	- Penigkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
65	Hendrawati, S.ST NIP. 19710614 199012 2 001	Kepala Puskesmas Baruh Gunung	- Penigkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
66	Depi Peringgi, SKM NIP. 19740928 199403 1 002	Kepala Puskesmas Pangkalan	- Penigkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
67	dr. Rini Herlina NIP. 19790824 201001 2 002	Kepala Puskesmas Muaro Paiti	- Penigkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan

NO	NAMA / NIP	JABATAN		KETERANGAN
		STRUKTURAL	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DENGAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
68	Ns. Desi Fitria, S.Kep NIP. 19810801 200501 2 009	Kepala Puskesmas Rimbo Data	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 	Dinas Kesehatan
69	Tuti Dwi Putri, S. Kep NIP. 19791003 200604 2 016	Kepala Puskesmas Gunuang Majintang	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 	Dinas Kesehatan
70	Ns. Dediya, S.Kep NIP. 19740816 199503 1 002	Kepala Puskesmas Pakan Rabaa	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 	Dinas Kesehatan
71	Imrizal, SKM NIP. 19690917 199001 1 001	Kepala Puskesmas Sialang	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 	Dinas Kesehatan
72	Sriningsih, S.Pt NIP. 19750811 200212 2 003	Kabid Perbibitan dan Produksi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota - Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota 	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
73	drh. Devi Kusmira NIP. 19751216 200212 2 003	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - Pembangunan Prasarana Pertanian - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/ Paser Hewan, Rumah Potong Hewan 	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
74	drh. Iswandi Sawir NIP. 19760711 200212 1 009	Kepala Bidang Keswan, Kesmavet, dan Pengolahan dan Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam daerah Kabupaten/ Kota - Pengawasan pemasukan dan pengeluaran Hewan dan produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
75	Susy Letrini, S.Pi, M.Si NIP. 19750226 200312 2 004	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah sungai, danau, waduk, rawa, genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam satu daerah Kabupaten/ Kota - Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan - Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan 	Dinas Perikanan

NO	NAMA / NIP	STRUKTURAL	JABATAN	KETERANGAN
			KUASA PENGGUNA ANGGARAN DENGAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
133	Yandri, SH NIP. 19680111 199303 2 002	Kepala Sub Bagian	<ul style="list-style-type: none"> - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan - Fasilitasi Tugas DPRD - Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - Peningkatan Kapasitas DPRD - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD - Pembahasan Kerjasama Daerah 	Sekretariat DPRD
134	Nur Akmal NIP. 19651026 198601 1 002	Kepala Bagian	<ul style="list-style-type: none"> - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Pembahasan Kebijakan Anggaran - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat - Fasilitasi Tugas DPRD 	Sekretariat DPRD

Ditetapkan di Sarilamak .
Pada Tanggal 28 Januari 2021

